

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

Nur Arip Arisman

Universitas Majalengka, Majalengka/Indonesia

*arifarisman504@gmail.com

ABSTRACT

The Majalengka Regency Government to overcome the problem of poverty in its region, especially in the Campaga Village area, Talaga District, including through the implementation of the distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT). However, often this does not meet the expectations of the community. Non-Cash Food Assistance (BPNT) is a government program assistance distributed to poor communities in Indonesia whose details are included in the Family Hope Program (PKH) or Beneficiary Families (KPM). One of the objectives of providing Non-Cash Food Assistance (BPNT) is to reduce the burden of community food expenditure and provide balanced nutrition to beneficiary families (KPM) in an appropriate and timely manner. BPNT (Non-Cash Food Assistance) is a food assistance program that is distributed non-cash using electronic coupons as part of the aid disbursement process. The implementation of the BPNT program plays an important role in helping reduce the burden of beneficiary families (KPM) by providing more nutritious and balanced food needs. This program also aims to improve the targeting and timeliness of food aid distribution to beneficiaries (KPM), provide flexibility for beneficiaries to choose and control how they meet their food needs, and support the achievement of sustainable development goals. Overall, this program contributes to balancing the economic conditions of the community in Campaga Village..

Keywords: Assistance, Implementation, Benefits, Community, Government

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di wilayahnya, khususnya di wilayah Desa Campaga Kecamatan Talaga, diantaranya melalui implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun seringkali hal tersebut tidak memenuhi harapan masyarakat. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan program pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat miskin di Indonesia yang rinciannya masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Salah satu tujuan pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat dan memberikan gizi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) merupakan program bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dengan menggunakan kupon elektronik sebagai bagian dari proses pencairan bantuan. Pelaksanaan program BPNT memegang peran penting dalam membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) dengan menyediakan kebutuhan pangan yang lebih bergizi dan seimbang. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran serta ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan pangan kepada KPM, memberikan keleluasaan bagi KPM untuk memilih serta mengendalikan pemenuhan kebutuhan pangannya, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan,

**Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Tala
Majalengka**

(Nur Arip Arisman)

program ini turut berkontribusi dalam menyeimbangkan kondisi perekonomian masyarakat di Desa Campaga.

Kata-kata Kunci: Bantuan, Implementasi, Manfaat, Masyarakat, Pemerintah

Korespondensi: Nur Arif Arisman. **Institusi Asal Penulis Utama.** Universitas Majalengka Alamat Institusi Penulis Utama Jl. KH Abdul Halim No. 103 Majalengka 45418. **No. HP, WhatsApp: 08995843990 Email: arifarisman504@gmail.com**

Submitted: Desember 2025 | **Accepted:** Desember 2025 | **Published:** Desember 2025
E-ISSN 3064 0679 | Website: <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/japri/>

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Tala Majalengka

(Nur Arip Arisman)

PENDAHULUAN

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial.

Maka dari itu berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di wilayahnya, khususnya di wilayah Desa Campaga Kecamatan Talaga, diantaranya melalui implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun seringkali hal tersebut tidak memenuhi harapan masyarakat. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan program pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat miskin di Indonesia yang rinciannya masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Salah satu tujuan pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat dan memberikan gizi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) merupakan program bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dengan menggunakan kupon elektronik sebagai bagian dari proses pencairan bantuan.

Dari data yang didapat bahwa jumlah penerima bantuan di Desa Campaga yaitu ada 322 orang, dari total 6 blok dengan rincian Blok Desa 31 kpm, Blok Kulon 57 kpm, Blok Cungkilak 48 kpm, Blok Mariuk 37 kpm, Blok Cicamas 40 kpm, Blok Cilengsar 109 Kpm. Namun, implementasi program BPNT di berbagai daerah, termasuk Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan observasi awal dan laporan masyarakat, beberapa kendala yang sering muncul meliputi, adanya dampak psikis yang ditimbulkan misalnya timbulnya rasa iri dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan, adanya penerima bantuan yang merupakan keluarga sejahtera, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme program. Selain itu, koordinasi antar instansi pelaksana dan pengawasan yang kurang optimal sering kali menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama program ini masih menjadi isu yang kompleks. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Majalengka tetap menjadi perhatian,

**Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Tala
Majalengka**

(Nur Arip Arisman)

khususnya di desa-desa yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan program BPNT dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal

Desa Campaga sebagai salah satu desa penerima program BPNT memiliki karakteristik unik yang dapat memberikan gambaran penting tentang keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan program. Sebagai wilayah dengan mayoritas 4 penduduk bekerja di sektor informal, masyarakat di desa ini sangat bergantung pada keberlanjutan program bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis bagaimana implementasi BPNT berjalan di desa ini, serta sejauh mana program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini tidak hanya relevan untuk mengevaluasi efektivitas program BPNT di Desa Campaga, tetapi juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kebijakan perlindungan sosial. Dengan menganalisis kendala implementasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pelaksanaan program di masa mendatang.

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

Menurut Sondang P. Siagian mendefinisikan administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Marliani, 2018). Administrasi bukan hanya sekedar aktivitas manajemen sehari-hari, tetapi melibatkan berbagai macam upaya terkoordinasi yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk dengan melibatkan berbagai pihak

Sedangkan menurut Pasolong yang dikutip dari buku Pengantar Administrasi Publik mendefinisikan:

“Administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif (Melawat, 2022)”.

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban dikutip dari buku Teori Administrasi:

“Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik yang diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan public (Melawat, 2022)”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan proses penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Proses ini tidak hanya melibatkan pelaksanaan teknis, tetapi juga interaksi antara tujuan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, secara individu maupun kelompok, untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan

Komunikasi menjadi hal yang paling utama dalam proses implementasi kebijakan publik untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mencapai suatu tujuan, sumber daya menjadi patokan dalam mewujudkan suatu kebijakan berjalan dengan baik jika sumberdaya kurang maka akan berakibat pada ketidak efektifan penerapan kebijakan. Kecenderungan atau disposisi sikap para pelaksana merujuk pada kesediaan dan komitmen mereka untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, para pelaksana tidak hanya perlu memahami tugas yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi juga harus memiliki keinginan kuat untuk menerapkan kebijakan

Komunikasi merupakan suatu proses yang melibatkan elmen-elmen pengiriman pesan, penyaluran komunikasi, penerimaan dan umpan balik. Edward III menjelaskan dalam buku formuli dan implementasi kebijakan publik oleh Kadji, (2015:64). Agar implementasi efektif, mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan kepada personel yang tepat, dan perintah tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten. Jika kebijakan yang ingin diimplementasikan oleh para pengambil keputusan tidak ditentukan dengan jelas, kebijakan tersebut dapat disalahpahami oleh mereka yang menjadi sasarannya. Jelas, kebingungan oleh para pelaksana tentang apa yang harus dilakukan meningkatkan kemungkinan bahwa mereka tidak akan mengimplementasikan kebijakan seperti yang diinginkan oleh mereka yang mengesahkan atau memerintahkannya.

Sumber daya yang sangat baik meliputi orang yang tepat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang dijalankan. Informasi yang cukup dan tepat mengenai pelaksanaan kebijakan dan koordinasi yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, selain itu kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan sejalan dengan tujuan, pembekalan dan sasaran yang telah ditentukan untuk pemanfaatan pelayanan publik.

Dalam konteks Implementasi BPNT sumber daya adalah fondasi teknis dan administratif dalam menjalankan program BPNT. Kurangnya SDM terlatih, fasilitas yang tidak

memadai, anggaran terbatas, atau tidak jelasnya kewenangan dapat menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, desa dan dinas terkait harus memastikan kecukupan dan kesiapan sumber daya demi terlaksananya program secara efektif dan merata.

Sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi kebijakan. Sikap pelaksana terkait dengan bagaimana cara pelaksana menerima, memahami, dan merespon kebijakan yang akan mereka laksanakan. Pelaksana yang memiliki pemahaman yang jelas terhadap tujuan dari kebijakan tersebut akan cenderung lebih mampu melaksanakan secara efektif.

Selain itu, penerimaan kebijakan oleh pelaksana sangat penting, karena sikap positif dapat mendorong pelaksanaan yang optimal, sementara resistensi atau ketidaksetujuan dapat menghambat implementasi. Komitmen pelaksana juga menjadi aspek penting, di mana tingkat dedikasi dan tanggung jawab mereka terhadap keberhasilan kebijakan akan memengaruhi hasil yang dicapai. Sikap pelaksana mencerminkan kualitas pelaksanaan kebijakan. Dalam program BPNT, pelaksana yang jujur, berkomitmen, empatik, dan taat prosedur akan memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Sebaliknya, sikap yang negatif dari pelaksana justru menjadi faktor penghambat implementasi program yang adil dan merata.

Struktur birokrasi mengacu pada sistem, prosedur, dan mekanisme yang digunakan untuk menjalankan kebijakan. Birokrasi yang terlalu kompleks, dengan prosedur yang berbelit-belit, cenderung menghambat pelaksanaan kebijakan karena dapat menimbulkan keterlambatan, kebingungan, dan inefisiensi. Sebaliknya, struktur birokrasi yang sederhana, jelas, dan fleksibel akan mempermudah pelaksana dalam memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, adanya hirarki yang terlalu kaku atau koordinasi yang buruk di dalam birokrasi juga dapat menghambat alur komunikasi dan pengambilan keputusan.

Oleh karena itu dalam konteks implementasi BPNT di Desa Campaga struktur birokrasi yang terorganisir, efisien, dan jelas sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi program BPNT. Ketidakjelasan struktur akan menyebabkan masalah teknis maupun administratif yang dapat menghambat pencapaian tujuan program, yakni penyaluran bantuan pangan kepada keluarga miskin secara tepat sasaran.

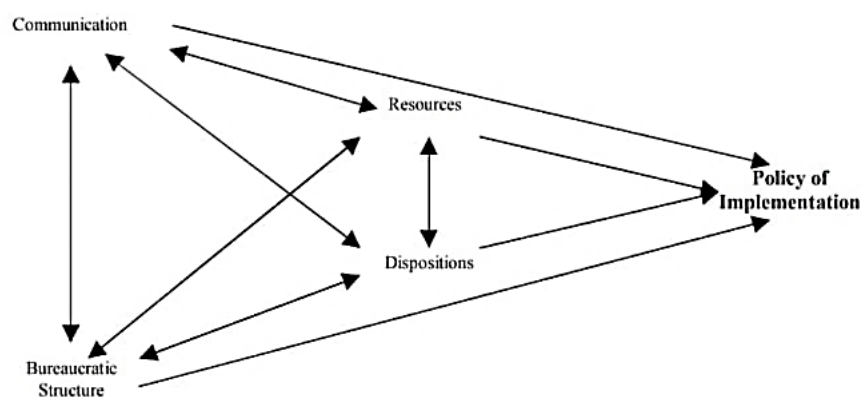
Model kebijakan ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn pada tahun 1975. Model ini menekankan pentingnya hubungan antara tujuan kebijakan implementasi, dan hasil yang diharapkan. Menurut Van Metter dan Van Horn, model ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan public, implementor, dan kinerja kebijakan publik (Kadji, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis metode penelitian kualitatif yang tujuannya untuk memahami fenomena secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pengalaman, persepsi, dan pandangan informan terhadap implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Campaga. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi (Bogdan dan Tylor dalam Laurentcia & Yusran, 2021).

Penelitian Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang kemudian ditafsirkan secara kontekstual. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap paling relevan untuk menggali secara detail bagaimana program BPNT dijalankan, kendala yang dihadapi pada masyarakat penerima manfaat di tingkat desa.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, tahun 2024. Penelitian ini mencakup kajian terhadap mekanisme pelaksanaan program, efektivitas distribusi bantuan, peran pihak-pihak terkait (seperti pemerintah desa, agen penyalur, dan masyarakat penerima manfaat), kendala yang dihadapi dalam proses implementasi, serta dampak program terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, penelitian juga berfokus pada kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.



Penelitian ini berfokus pada model implementasi kebijakan menurut Model Edward III (1980) menawarkan pendekatan yang sederhana dan praktis untuk memahami implementasi

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Tala Majalengka

(Nur Arip Arisman)

kebijakan. Dengan memperhatikan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, model ini dapat digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis atau mengevaluasi implementasi kebijakan public

Dalam penelitian kualitatif, fokus utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Istilah populasi tidak digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan informan yang digunakan peneliti adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2020:218) Purposive sampling adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua informan memiliki kriteria yang sesuai, cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang mempunyai pertimbangan tertentu berdasarkan sumber datanya, seperti siapa yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.

Informan utama meliputi aparat Pemerintah Desa, seperti kepala desa dan perangkat desa, yang memiliki peran dalam pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan program di tingkat desa. Selain itu, pengurus Rw juga sangat penting dalam memperoleh informasi terkait keberlangsungan program. Masyarakat penerima manfaat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) juga menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini, untuk menggali persepsi, pengalaman, serta dampak langsung program terhadap kesejahteraan mereka.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa dan pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk menentukan jumlah informan yang akan digunakan dalam penelitian maka dapat dilihat dari table dibawah ini.

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala desa campaga	1
2.	Sekretaris desa	1
3.	Kasi pelayanan	1
4.	Pengurus Rw	1
5.	Dinas Sosial Kab.Majalengka	1
6.	Masyarakat penerima BPNT	12
Jumlah		17

Informan kunci adalah pihak yang memiliki peran utama dalam implementasi BPNT dan memiliki informasi mendalam terkait kebijakan, pelaksanaan, serta kendala yang terjadi.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Tala Majalengka

(Nur Arip Arisman)

Dalam penelitian ini, informan kunci meliputi: 1) Kepala Desa Campaga: Memiliki peran dalam pengawasan dan koordinasi pelaksanaan BPNT di desa. 2) Sekretaris Desa: Bertanggung jawab dalam administrasi program dan penyampaian informasi ke masyarakat. 3) Kasi Pelayanan Desa: Terlibat dalam distribusi dan teknis pelaksanaan BPNT di tingkat desa. 4) Dinas Sosial Kabupaten Majalengka: Sebagai pembuat kebijakan dan pengawas implementasi program BPNT di daerah

Informan tambahan adalah pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi memiliki pengalaman dan pandangan terkait dampak program BPNT. Informan tambahan dalam penelitian ini meliputi: 1) Pengurus RW/RT: Berperan dalam sosialisasi program BPNT di lingkungan masyarakat. 2) Masyarakat Penerima Manfaat (KPM): Sebagai pihak yang menerima BPNT dan mengalami langsung manfaat serta kendala dari program ini.

Menurut Sugiyono (2020) Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini harus disesuaikan dengan pendekatan penelitian, apakah kualitatif atau kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kualitatif (narasi, opini, atau deskripsi) atau kuantitatif (angka atau statistik). Dengan demikian data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik 1) Wawancara yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab secara tatap muka. 2) Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap obyek dan situasi di lapangan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Campaga. 3). Dokumentasi yaitu merupakan metode pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari wawancara dan observasi akan lebih dipercaya bila didukung oleh foto-foto. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dengan mengumpulkan data tertulis, arsip maupun gambar-gambar yang berkaitan dengan kegiatan dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Campaga. 4). Studi Kepustakaan yaitu merupakan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya tulis ilmiah, dan lain yang berkenaan dengan penelitian.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian dilapangan melalui wawancara, dokumentasi, dan dokumentasi. Sumber data primer meliputi kepala desa, terkait peran pemerintahan desa dalam implementasi BPNT. Sekretaris desa dan kasi pelayanan,

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Tala Majalengka

(Nur Arip Arisman)

terkait mekanisme administrasi dan kendala teknis program. Pengurus Rw, terkait peran dalam sosialisasi dan pendampingan penerima manfaat. Masyarakat penerima manfaat, terkait pengalaman dalam menerima bantuan dan kendala yang dihadapi. Dinas Sosial, terkait kebijakan dan koordinasi dalam penyaluran BPNT.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi resmi, laporan, dan penelitian terdahulu yang mendukung analisis penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi dokumentasi dari pemerintahan desa, meliputi data penerimaan BPNT. Laporan dari Dinas Sosial, meliputi kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi BPNT

Setelah diperoleh data hasil observasi dan wawancara serta dokumen lapangan, dilakukan analisis data kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data deskriptif yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Sugiono dalam buku Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (2020) Teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Reduksi Data, Pada tahap ini, data mentah yang diperoleh dari lapangan, seperti wawancara, catatan observasi, dan dokumen terkait, disaring, disederhanakan dan dirangkum tanpa menghilangkan esensi informasi. Informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan diabaikan, sementara informasi yang penting akan dirangkum dan dikelompokkan berdasarkan tema yang berkaitan, seperti proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan dampak program BPNT 2) Penyajian Data, Setelah data diringkas, data tersebut disajikan dalam bentuk yang terorganisir, seperti dalam narasi deskriptif maupun tabel. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah analisis lebih lanjut, sehingga pola, hubungan, atau tema tertentu dapat terlihat dengan jelas. Misalnya, data tentang kendala pelaksanaan BPNT dapat disajikan dalam tabel yang menghubungkan kendala dengan penyebab dan solusinya. 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, Tahap terakhir adalah menafsirkan data untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan pola atau hubungan yang ditemukan selama analisis. Misalnya, peneliti dapat menyimpulkan apakah pelaksanaan program BPNT di Desa Campaga sudah sesuai dengan pedoman atau mengalami kendala tertentu

Teknik keabsahan data merupakan serangkaian metode yang digunakan oleh peneliti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini valid, dapat dipercaya dan mencerminkan realitas yang sebenarnya. Salah satu cara yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini adalah melalui teknik triangulasi. Menurut Sugiono Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2020). Teknik triangulasi ini dapat dilakukan

dengan tiga pendekatan, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi teknik. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi sumber dimana peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data dari hasil wawancara. Selain itu, informasi yang diperoleh dari satu sumber dibandingkan dengan informasi dari sumber lainnya untuk memastikan konsistensi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah suatu proses penerapan rencana kebijakan atau program kedalam tindakan nyata melalui langkah-langkah konkrit guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara khusus dalam mengatur teknis dalam pelaksanaan program BPNT, termasuk mekanisme, kriteria penerima dan pelaksanaan di lapangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (permensos) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pelaksanaan program BPNT memegang peran penting dalam membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) dengan menyediakan kebutuhan pangan yang lebih bergizi dan seimbang. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran serta ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan pangan kepada KPM, memberikan keleluasaan bagi KPM untuk memilih serta mengendalikan pemenuhan kebutuhannya, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, program ini turut berkontribusi dalam menyeimbangkan kondisi perekonomian masyarakat di Desa Campaga.

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil temuan serta pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber data, baik secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, maupun secara tidak langsung melalui bahan-bahan tertulis dan dokumen yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan menurut Edward III, sebagaimana dikutip dalam buku "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik". Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

Dalam pelaksanaan implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Campaga komunikasi yang dimaksud adalah sosialisasi terkait program tersebut yang merupakan bagian dari komunikasi. Melalui sosialisasi membantu memastikan bahwa individu berinteraksi dengan orang lain untuk bertukar pikiran, ide, gagasan, dan pengalaman. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Campaga, terlihat bahwa

**Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Tala
Majalengka**

(Nur Arip Arisman)

komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti rapat warga, pengurus RW, serta melalui WhatsApp. Namun, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, masih ditemukan beberapa penerima manfaat yang mengaku belum sepenuhnya memahami informasi yang disampaikan, baik karena keterbatasan akses informasi maupun metode penyampaian yang kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, efektivitas komunikasi perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat menerima informasi secara merata dan jelas.

Menurut pendapat Bapak Ruslan Selaku Kepala Desa Campaga menyatakan bahwa:

“Tentu, pelaksanaan program BPNT masih berjalan dengan baik sampai saat ini. Pemerintahan desa berupaya sebaik mungkin dalam mensosialisasikan program BPNT ini kepada masyarakat secara sederhana agar mudah dipahami, sosialisasi yang kami lakukan biasanya lewat rapat bersama warga penerima manfaat. Pemerintahan desa selalu berkoordinasi dengan dinas sosial agar program ini dalam pendataannya bisa sesuai dengan *by name by address* nya.”(26 Maret 2026)

Menurut Bapak Sukara Selaku Sekretaris di Desa Campaga menyatakan bahwa:

“Program BPNT ini kami sampaikan sebagai bantuan pangan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu. Kami jelaskan bahwa untuk sekarang bantuan ini berupa uang yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.” (26 Maret 2025)

Menurut Bapak Nurul Misbahudin Selaku Kasi Pelayanan di Desa Campaga menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Campaga kami dari pihak desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme program ini yaitu dengan cara mengumpulkan masyarakat yang terdaftar selaku penerima manfaat, biasanya kami menyampaikan informasi terkait BPNT ini melalui ketua Rw. Untuk sekarang ini dalam penyampaian informasi tidak begitu sulit dikarenakan dengan adanya WhatsApp penyebaran informasi bisa lebih cepat.” (24 Maret 2025)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah desa, perangkat desa, pengurus RW, hingga masyarakat penerima manfaat (KPM), dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program BPNT di Desa Campaga telah dilakukan, namun belum sepenuhnya merata dan konsisten. Pemerintah desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kasi Pelayanan menyatakan telah melakukan sosialisasi melalui rapat warga, ketua RW, dan media seperti WhatsApp. Mereka juga menyatakan bahwa informasi tentang program BPNT disampaikan secara sederhana dan langsung ke masyarakat.

Sebagian masyarakat merasa sudah mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai mekanisme dan hak mereka sebagai penerima manfaat. Namun, di sisi lain, banyak masyarakat penerima manfaat mengungkapkan bahwa mereka kurang mendapatkan informasi yang jelas dan berkelanjutan. Sosialisasi dinilai hanya dilakukan diawal program, sementara penyampaian informasi selanjutnya seringkali tahu melalui tetangga. Beberapa penerima manfaat merasa bahwa sosialisasi kurang maksimal, informasi yang sering terlambat, dan penjelasan tidak selalu jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pihak pelaksana dengan masyarakat penerima. Dari pihak Dinas Sosial, pengakuan disampaikan bahwa memang masih ada keterbatasan dalam pelaksanaan sosialisasi di tingkat desa, sehingga perlu adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah desa agar informasi program benar-benar dipahami masyarakat secara menyeluruh.

Sumber daya menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, sumber daya yang dimaksud adalah mencakup segala sesuatu yang mendukung dalam pelaksanaan program bantuan Pangan Non Tunai di Desa Campaga. Implementasi Program BPNT mencakup petugas yang bertanggung jawab atas program dan masyarakat penerima BPNT, yang merupakan sasaran utama program. Informasi yang relevan juga dimasukkan ke dalam sumber daya yang diperlukan, seperti siapa saja masyarakat penerima BPNT di Desa ini, dengan data yang telah ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan penerima BPNT. Karena semuanya memiliki standar operasional standar (SOP) untuk memastikan bahwa setiap program berjalan dengan baik, karena program tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa fasilitas yang baik.

Dari hasil observasi di lapangan, terlihat bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Campaga telah didukung oleh petugas yang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam menangani bantuan sosial. Awalnya perogram ini berupa pemberian bahan pangan berupa sembako, namun, keterbatasan kesiapana e-warong dan masalah kualitas bahan pangan yang kurang layak menjadi hambatan di lapangan. Kendati demikian, ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penggunaan teknologi komunikasi cukup membantu memperlancar pelaksanaan program.

Menurut pendapat Bapak Ruslan selaku Kepala Desa Campaga menyatakan bahwa:

“Untuk menjalankan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa, kita harus mengikuti aturan dan prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku. Hal ini terutama berlaku saat memilih petugas yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan, agar tidak terlalu banyak petugas kewalahan atau tidak berkualitas. Ini penting agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif serta menghindari pelanggaran dari orang yang mengambil keuntungan sendiri.”(26 Maret 2025)

Menurut pendapat Bapak Nurul Misbahudin selaku Kasi Pelayanan di Desa Campaga menyatakan bahwa:

“Program BPNT telah berjalan di Desa Campaga pada tahun 2018, namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2022 mekanismenya di ubah yang tadinya diberikan berupa kebutuhan pangan diantaranya sembako berupa beras, telur, minyak dan lainnya diubah menjadi dana sebesar Rp.200.000.00 per bulan yang diberikan langsung kepada masyarakat melalui bank BRI. Hal ini dikarenakan kurang siapnya penyediaan E-warong sehingga adanya keluhan dari masyarakat penerima manfaat bahwa bahan pangan yang busuk, tidak layak makan. Oleh karena itu diubah menjadi uang tunai untuk mengurangi kecurangan dari pihak tertentu.”(24 Maret 2025)

Sejalan dengan pendapat Bapak Ali Nurjaman selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Beliau menyatakan bahwa:

“Untuk sekarang dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai ini bukan dalam bentuk sembako lagi, sekarang sudah diberikan secara tunai melalui kartu penerima manfaat, Dinas sosial tidak tahu fisik uangnya dikarenakan uang tersebut sudah masuk ke dalam rekening masyarakat penerima manfaat dan hal ini tidak menimbulkan masalah dari masyarakatnya.” (17 April 2025)

Dari hasil observasi dan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program BPNT di Desa Campaga sangat bergantung pada pemenuhan sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas agar kegiatan berjalan efektif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan terutama terkait ketersediaan fasilitas pendukung dan kesiapan teknis. Awalnya, mekanisme BPNT berupa pemberian bahan pangan (sembako), namun karena keterbatasan kesiapan E-warong dan masalah kualitas bahan pangan, mekanisme diubah menjadi penyaluran tunai melalui bank (BRI) langsung ke rekening penerima. Perubahan ini dinilai lebih efisien, mengurangi potensi kecurangan, serta tidak menimbulkan keluhan berarti dari masyarakat.

Sementara itu, dari fasilitas pendukung, belum terdapat fasilitas khusus untuk pelaksanaan BPNT, tetapi kantor desa dan RW tetap menjadi tempat masyarakat berkonsultasi atau menyampaikan keluhan. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa lokasi pencairan cukup mudah dijangkau, namun masalah antrean atau keterlambatan pencairan kadang masih terjadi. Dengan demikian, aspek sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, dan mekanisme penyaluran dana menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan BPNT di desa ini.

Sikap pelaksana adalah perilaku, cara pandang, dan respons dari para petugas atau pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Sikap ini mencerminkan bagaimana mereka menjalankan tugas, melayani masyarakat, mematuhi prosedur, serta menyikapi masalah atau hambatan yang muncul di lapangan. Dalam konteks

**Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Tala
Majalengka**

(Nur Arip Arisman)

kebijakan publik seperti BPNT, sikap pelaksana memegang peran penting karena bisa menentukan berhasil tidaknya tujuan program. Bahkan jika peraturan sudah bagus, tanpa sikap pelaksana yang baik, pelaksanaan di lapangan bisa gagal atau menimbulkan masalah.

Dari hasil observasi di lapangan para pelaksana program BPNT di Desa Campaga menunjukkan sikap yang cukup responsif, ramah, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dalam praktiknya, petugas desa sering kali membantu warga yang mengalami kendala, seperti kesulitan pencairan di ATM atau kehilangan kartu. Observasi menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial kepada warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia.

Menurut pendapat Bapak Sukara selaku Sekretaris Desa Campaga menyatakan bahwa:

“Secara umum tugas dari sekretaris desa adalah verifikasi data BPNT yang disetorkan oleh kasi Pelayanan desa. Dalam melakukan pengambilan data dilakukan skala prioritas untuk masyarakat penerima bantuan. Hal ini bukan berarti mengesampingkan seluruh masyarakat. karena dalam kriteria BPNT ada kriteria tidak memenuhi syarat (TMS) dan memenuhi syarat (MS), untuk itu skala prioritas menjadi hal yang sangat diutamakan, karena kuota BPNT yang sangat terbatas memungkinkan untuk pemerintah desa mengelola kembali data-data yang ada.”(24 Maret 2025)

Menurut Bapak Nurul Musbahudin selaku Kasi Pelayanan di Desa Campaga menyatakan bahwa:

“Kalau ada keluhan, biasanya kami tangani secepat mungkin. Misalnya, ada masyarakat yang mengeluh tidak terdaftar padahal merasa berhak, atau ada masalah saat pencairan, kami akan cek datanya dulu, lalu berkoordinasi dengan dinas sosial kalau perlu. Kami juga menyampaikan informasi melalui ketua RW atau WhatsApp supaya masyarakat tidak bingung. Intinya, kami berusaha melayani masyarakat dengan baik supaya masalah-masalah bisa cepat diselesaikan.” (24 Maret 2025)

Dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh, dapat diketahui bahwa sikap para pelaksana program BPNT di Desa Campaga menunjukkan tanggung jawab yang cukup baik dan serius dalam menjalankan tugasnya. Dari sisi masyarakat berpendapat bahwa para pelaksana di desa juga bersikap peduli dan bersedia membantu warga yang mengalami kesulitan teknis, seperti mencairkan bantuan di ATM atau memahami penggunaan HP. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana tidak hanya terbatas pada menjalankan tugas administratif, tetapi juga mencakup kepedulian sosial dan pendampingan kepada masyarakat agar program berjalan lancar.

Secara keseluruhan, sikap pelaksana di Desa Campaga mencerminkan tanggung jawab, kepedulian, serta komitmen untuk memastikan pelaksanaan program BPNT berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada kekuatan struktur birokrasi. Meski sumber daya tersedia, para pelaksana memahami tugas mereka, dan memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kebijakan, keberhasilan tetap dapat terhambat bila struktur birokrasi lemah. Kompleksitas kebijakan sering kali menuntut kerja sama berbagai pihak, dan tanpa dukungan struktur birokrasi yang baik, sumber daya tidak akan termanfaatkan secara efektif, sementara motivasi pelaksana bisa menurun, sehingga pelaksanaan kebijakan tersendat. Sebagai pelaksana, birokrasi harus mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik melalui koordinasi yang baik.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa ini, mengacu pada sistem, prosedur, dan mekanisme yang dijalankan dalam melaksanakan program ini, selain itu diperlukan koordinasi yang baik antara penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, terutama terkait aturan dan alur pelaksanaan. Pembagian tugas harus dilakukan secara merata, dan setiap pihak perlu memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar program dapat berjalan dengan optima. Namun, masih ditemukan hambatan terkait validasi dan sinkronisasi data antara desa dan pusat, yang berdampak pada keterlambatan pembaruan data penerima manfaat. Evaluasi berkala perlu lebih ditingkatkan agar program dapat berjalan secara tepat sasaran dan efisien. Mengingat kegiatan ini cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak, kerja sama yang solid sangat diperlukan.

Sedangkan menurut Bapak Nurul selaku Kasi Pelayanan di Desa Campaga mengungkapkan bahwa:

“Yang paling sering jadi hambatan adalah data penerima manfaat yang kadang tidak sesuai atau belum diperbarui. Selain itu, kadang ada kendala teknis seperti pencairan yang lama. Tapi secara umum, kendala-kendala ini bisa kami atasi lewat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.” (24 Maret 2025)

Sedangkan menurut pendapat Bapak Abud selaku Ketua Rw di Desa Campaga mengungkapkan bahwa:

“Sebagai ketua RW, peran saya adalah membantu pihak desa memverifikasi data penerima di lapangan. Saya memastikan bahwa warga yang masuk dalam daftar penerima memang benar-benar layak dan sesuai kriteria. Jika ada warga yang sudah pindah atau kondisi ekonominya sudah membaik, saya laporkan ke pihak desa supaya datanya bisa diperbarui.”(27 April 2025)

Menurut Ibu Titi selaku penerima manfaat di Blok Mariuk berpendapat bahwa:

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Tala Majalengka

(Nur Arip Arisman)

“Menurut saya, prosedurnya sebenarnya cukup sederhana, tapi tetap ada beberapa kesulitan. Misalnya, bagi yang tidak terbiasa menggunakan ATM atau HP, seperti saya, kadang bingung saat pencairan. Untungnya, ada petugas desa atau tetangga yang siap membantu. Jadi walaupun ada tantangan, bantuan masih bisa diambil dengan pendampingan.” (27 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Campaga telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. Pemerintah Desa, dinas sosial, hingga ketua RW memiliki peran masing-masing dalam memastikan ketepatan data dan kelancaran proses penyaluran bantuan. Prosedur administrasi dinilai cukup jelas dan sederhana, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti pembaruan data serta tantangan bagi sebagian masyarakat yang kurang memahami teknologi. Meski demikian, adanya koordinasi yang baik dan pendampingan dari petugas di lapangan turut membantu mengatasi hambatan tersebut, sehingga pelaksanaan program tetap dapat berjalan secara efektif dan bertanggung jawab.

Program BPNT memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Campaga, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga kurang mampu setiap bulannya. Bantuan ini meringankan beban ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, dan membantu warga yang sebelumnya kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat penerima manfaat di Desa Campaga, menurut pendapat Ibu Mamah penerima manfaat di Blok Campaga Desa mengungkapkan bahwa:

“Alhamdulillah, saya merasa sangat terbantu dengan adanya program BPNT ini. Bantuan yang saya terima setiap bulan bisa membantu mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, terutama untuk anak-anak di rumah. Walaupun tidak semua kebutuhan terpenuhi, setidaknya bisa meringankan beban saya.” (24 Maret 2025)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa program BPNT membawa dampak positif bagi penerima manfaat di Desa Campaga. Bantuan ini membantu mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari, meringankan beban ekonomi keluarga, serta memberikan rasa tenang di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Bahkan bagi warga yang memiliki usaha kecil, bantuan ini tetap bermanfaat karena membantu mengalihkan penghasilan usaha untuk keperluan lain seperti pendidikan atau tambahan modal. Secara keseluruhan, program ini dirasakan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan Program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk

**Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Tala
Majalengka**

(Nur Arip Arisman)

memenuhi kebutuhan pangan. Sejak diluncurkannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Campaga, terjadi sejumlah perubahan baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun dari respons masyarakat. Program ini membawa perubahan dalam sistem penyaluran bantuan sosial, yang sebelumnya bersifat non-tunai menjadi tunai melalui mekanisme perbankan. Hal ini mendorong masyarakat untuk mulai terbiasa menggunakan kartu ATM dan memahami prosedur perbankan sederhana.

Penerimaan masyarakat terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Campaga menunjukkan variasi, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti efektivitas pelaksanaan dan transparansi dalam penyaluran bantuan. Ketika program dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai prosedur, masyarakat umumnya menyambutnya dengan baik dan merasakan dampak positif terhadap kondisi ekonomi serta kesejahteraan mereka. Sebaliknya, apabila terjadi kekeliruan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dikalangan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka telah berjalan dengan cukup baik. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terkait pelaksanaan program tersebut dengan menggunakan teori Edward III sebagai acuan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Komunikasi: Pemerintah desa telah berupaya melakukan sosialisasi program BPNT melalui berbagai saluran, seperti rapat warga, ketua RW, dan media WhatsApp. Sebagian besar masyarakat merasa mendapat penjelasan yang cukup mengenai mekanisme dan hak mereka. Namun, masih terdapat penerima manfaat yang menilai sosialisasi belum maksimal, informasi sering terlambat, dan penjelasan kurang jelas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan pemerataan penyampaian informasi agar lebih mudah dipahami dan tepat waktu bagi seluruh masyarakat. 2) Sumber Daya: Keberhasilan pelaksanaan BPNT sangat bergantung pada sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas serta kesiapan infrastruktur. Perubahan mekanisme dari pemberian sembako ke penyaluran tunai melalui bank dinilai lebih efisien, mengurangi potensi kecurangan, dan meminimalisir keluhan masyarakat. Ketersediaan SOP dan pemilihan petugas yang sesuai menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas program. 3) Sikap Pelaksana: Para pelaksana program di Desa Campaga menunjukkan sikap tanggung jawab, kepedulian, dan komitmen yang baik dalam menjalankan **Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa (BPNT) di Desa Campaga Kecamatan Tala Majalengka**

tugas. Mereka aktif menanggapi keluhan masyarakat dan membantu penerima manfaat yang mengalami kendala teknis, seperti pencairan bantuan di ATM. Sikap ini tidak hanya pelayanan administratif, tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial terhadap keberhasilan program. 4.) Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi yang jelas, koordinasi antar pihak, serta pembagian tugas yang merata menjadi kunci keberhasilan implementasi BPNT. Prosedur administrasi yang sederhana dan pengawasan berjenjang dari dinas sosial hingga desa membantu kelancaran pelaksanaan program. Monitoring dan pembaruan data secara berkala juga dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Pemerintah desa bersama pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kepada masyarakat penerima manfaat. Sosialisasi perlu dilakukan secara merata dan berkelanjutan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan warga, media digital seperti WhatsApp, serta penyampaian informasi secara langsung oleh petugas di lapangan. Hal ini bertujuan agar seluruh penerima manfaat memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami.

Untuk menunjang kelancaran program, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan BPNT. Selain itu, fasilitas pendukung seperti kemudahan akses ke ATM dan kejelasan petunjuk teknis pencairan bantuan perlu diperhatikan guna mengurangi hambatan teknis yang kerap dialami oleh penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- BPS Indonesia, S. I. (2023). Catalog: 1101001. Statistik Indonesia 2023, 1101001, 790. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the third world. In *Politics and Policy Implementation in the Third World*. <https://doi.org/10.2307/2619175>
- Hasimi, D. M. (2020). ANALISIS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. 2(1), 81–93.

- Laurentcia, S., & Yusran, R. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang*. 4(1), 7–17.
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>
- Melawat, S. H. (2022). Pengantar Administrasi Publik. In *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku_pengantar_administrasi_publik.pdf
- Yulianto Kadji, M. (2015). *Formulasi Kebijakan Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press.
- Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik. Konseptual dan Praktik. In *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

UNDANG-UNDANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.